

**SINERGITAS ALUMNI DAN PONDOK PESANTREN ANNUQAYAH DALAM
PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT KABUPATEN SUMENEP**

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat

Memperoleh Gelar Magister Dalam Program Studi Ekonomi Syari'ah



OLEH:

M. FAYYAD ZAINAL ABIDIN

NIM: F02416091

PASCASARJANA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL

SURABAYA

2018

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : M. FAYYAD ZAINAL ABIDIN
NIM : F02416091
Program : Magister (S-2)
Institusi : Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya

dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa TESIS ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 15 Januari 2019

Saya yang menyatakan



M. Fayyad Zainal Abidin

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Tesis M. Fayyad Zainal Abidin ini telah disetujui pada tanggal 08 Oktober 2018

Oleh

Pembimbing



Dr. Sirajul Arifin, S.Ag., SS., M.E.I

PENGESAHAN TIM PENGUJI

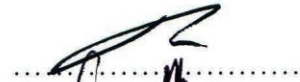
Tesis M. Fayyad Zainal Abidin ini telah diuji
pada tanggal 07 November 2018

Tim Penguji:

1. Dr. Khotib, M.Ag (Ketua)



2. Dr. Sirajul Arifin, S.Ag., SS., M.E.I (Penguji)




3. Dr. Fahrur Ulum, S. Pd. MEI. (Penguji)



Surabaya, 07 November 2018
Direktur,




Prof. Dr. H. Aswadi, M.Ag.
NIP. 196004121994031001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpustakaan@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : M Fayyad Zainal Abidin
NIM : F02416091
Fakultas/Jurusan : Ekonomi Syariah
E-mail address : m.fayyadzainalabidin92@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Sinergitas Alumni Dan Pondok Pesantren Annuqayah Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kabupaten Sumenep

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 05 Agustus 2019
Penulis

(M Fayyad Zainal Abidin)

2. Teori Pemberdayaan Ekonomi

Melihat pada konseptual, pemberdayaan ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi yang diikuti oleh perubahan-perubahan dalam struktur dan corak kegiatan ekonomi.²⁷ Sehingga ada alur yang jelas pada pertumbuhan ekonomi dari berbagai sektor dengan adanya percepatan yang dulunya masih tradisional hingga kepada sistem modern agar tumbuh kepada pemerataan pendapatan.

Pemberdayaan ekonomi adalah upaya-upaya meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain memberdayakan adalah memampukan dan mendirikan masyarakat.²⁸

Sejalan dengan teori Schumpeter, faktor terpenting untuk perkembangan ekonomi ialah *entrepreneur*, dimana faktor tersebut akan melahirkan penemuan (*discovery*), suatu hal yang sudah ada tetapi belum diketahui sebelumnya (*invenisi*), dan inovasi.

Begitu pula kajian para ulama dapat dirumuskan dasar-dasar filosofis pemberdayaan ekonomi diantaranya:

1. Mengatur model pemberdayaan yang berdasarkan Islam.
2. Keadilan, yaitu pembangunan yang tidak pincang artinya ada pemerataan ekonomi (*growth with equity*).
3. *Khilafah*, yang menyatakan bahwa manusia adalah wakil Allah SWT untuk memakmurkan bumi dan bertanggung jawab kepada Allah tentang pengelolaan sumberdaya manusia dalam hubungan dengan Allah SWT.

²⁷ Sadono Sukirno, *Pengantar Teori Makro Ekonomi* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999), 415.

²⁸ Ginanjar Kartassamita, *Pengembangan Untuk Rakyat, Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan* (Jakarta: PT. Pustaka Cresindo, 1996), 144.

kegunaan penelitian, kerangka teoritik, penelitian terdahulu, metode penelitian, sistematika dan pembahasan.

Bab kedua, merupakan tinjauan umum sinergi dan pemberdayaan ekonomi, Pertama, tinjauan tentang teori sinergitas, meliputi: pengertian sinergitas, konsep sinergitas dan klasifikasi teori sinergitas, . Kedua, analisis tentang pemberdayaan ekonomi meliputi, pengertian pemberdayaan ekonomi, konsep pemberdayaan, tujuan pemberdayaan ekonomi, pemberdayaan ekonomi dalam kajian ekonomi islam, dan metode-metode pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Bab Ketiga, berisi data tentang keadaan sumber daya alam di Kabupaten Sumenep, profil Pondok Pesantren Annuqayah, Ikatan Alumni Annuqayah dan perannya dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat, unit usaha Yayasan Annuqayah dan Sinergitas Alumni dan Pondok Pesantren Annuqayah dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat Kabupaten Sumenep.

Bab Keempat, berisi penyajian dan analisis data yang terdiri dari analisis peranan Pondok Pesantren Annuqayah dalam pemberdayaan ekonomi, telaah kritis terhadap sinergitas alumni dan pesantren terhadap pemberdayaan ekonomi di kabupaten Sumenep, dan analisis strategi alumni dan Pondok Pesantren Annuqayah dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat Kabupaten Sumenep.

Bab Kelima, adalah penutup yang berisi kesimpulan dan saran dari peneliti berdasarkan hasil penelitian.

ekonomi maupun sosial, seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, serta berpartisipasi dalam kegiatan sosial.³⁰

Selanjutnya, pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan.

Oleh karena itu, pemberdayaan masyarakat ialah suatu tindakan membangkitkan kemauan, kemampuan, dan kepercayaan pada diri sendiri, agar mereka dapat terlibat secara aktif dalam pembangunan. Termasuk adanya pergerakan secara metadis, efisien, dan terorganisir.³¹

Pendapat lain mengatakan, pemberdayaan masyarakat adalah serangkaian proses dalam upaya meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mencapai kemakmuran dan kesejahteraan.

Proses ini dilakukan dengan memfasilitasi masyarakat agar mampu:

- a. Menganalisis situasi kehidupan dan segala permasalahan yang dihadapi.
- b. Mencari pemecahan masalah berdasarkan kemampuan dan keterbatasan yang dimiliki.
- c. Mengembangkan usaha dengan segala kemampuan dan sumber daya yang dimiliki.
- d. Mengembangkan sistem untuk mengakses sumberdaya yang diperlukan.

Pendekatan pemberdayaan masyarakat ini akan mengantarkan masyarakat dalam proses untuk mampu menganalisis masalah dan peluang yang ada, serta mencari jalan keluar sesuai sumberdaya yang mereka miliki. Selanjutnya, mereka sendiri yang membuat keputusan, rencana, implementasi, serta evaluasi efektifitas kegiatan yang dilakukan.

Input utama program ini adalah pengembangan sumberdaya manusia, peningkatan pengetahuan dan keterampilan, pengurangan sumberdaya dari pihak luar, baik pemerintah

³⁰ Ismail Nawawi Uha, *Pembangunan dan Problem Masyarakat* (Surabaya: CV. Putra Media Nusantara, 2009), 144.

³¹ Wiryanto Yomo-Gunter Wehner, *Membangun Masyarakat: Buku Pegangan bagi Pekerja Pembangunan Masyarakat* (Bandung: Alumni, 1973), 27.

dikelola dengan baik ketika kebutuhan manusia dapat terpenuhi dan ketika kesempatan sosial dapat dimaksimalkan.³⁸

3. Tujuan Pemberdayaan

Tujuan dari pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya.³⁹

Upaya pemberdayaan masyarakat merupakan tuntutan utama pembangunan, ini terkait dengan teori sumber daya manusia yang memandang mutu penduduk sebagai kunci utama pembangunan. Banyaknya penduduk bukan beban suatu bangsa, bila mutunya tinggi, untuk itu pembangunan hakekat manusiawi hendaknya menjadi arah pembangunan dan perbaikan mutu sumber daya manusia akan menumbuhkan inisiatif dan kewiraswastaan.⁴⁰

Human capital theory, menekankan bahwa manusia merupakan sumber daya utama, berperan sebagai subjek baik dalam upaya peningkatan taraf hidup dirinya maupun dalam melestarikan dan memanfaatkan lingkungannya. Menurut teori ini, yang sangat penting adalah modal yang dimiliki manusia itu terdapat pada dirinya sendiri, berupa sikap, pengetahuan, ketrampilan dan aspirasi.⁴¹

³⁸ Ibid., 35.

³⁹ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat, Memberdayakan Rakyat* (Bandung : PT. Retika Adhitama, 2005),60.

⁴⁰ Anwar, *Manajemen Pemberdayaan Perempuan* (Bandung : Alfabeta, 2007), 03.

⁴¹ Ibid., 04.

lingkungan sosial ekonomi. Ia menawarkan enam langkah untuk menyokong tegaknya ekonomi rakyat. Enam langkah yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Harus ada perubahan dalam pola gaya hidup yang selama ini berorientasi pada konsumsi barang-barang ekspor sebagai symbol status menuju pada orientasi cinta produk dalam negeri (*domestic product*) yang dapat memuaskan kebutuhan dan memanfaatkan tenaga buruh secara berlimpah-limpah.
- b. Harus ada perubahan sikap dan kebijakan secara resmi yang berpihak pada usaha ekonomi rakyat sehingga usaha ekonomi rakyat tidak di *out*. Mereka harus didukung dengan sejumlah kebijakan-kebijakan yang memungkinkan terus mengalami perkembangan dan dinamika dalam memenuhi secara potensinya sebagai soko guru ekonomi nasional.
- c. Unit usaha ekonomi rakyat juga harus diperdayakan melalui bantuan baik dalam memperoleh input-input ekonomi yang lebih baik, teknologi yang sesuai, teknik pemasaran yang efektif dan pelayanan ekstensi lainnya sehingga mampu berkompetisi dengan produk industri berskala besar dan produk-produk import baik dalam hal kualitas maupun harga.
- d. Unit usaha ekonomi rakyat juga harus diperdayakan untuk meningkatkan ketrampilan mereka melalui fasilitas training yang lebih baik, hal Ini memerlukan pemeriksaan secara seksama dari lembaga pendidikan untuk mengeliminasi *mismatch* antara keterampilan dengan kebutuhan dan pendidikan yang ditawarkan.
- e. Mereka harus diberikan kesempatan untuk mengakses sumber pendanaan (*finansial*). Kurangnya pendanaan menjadi salah problem krusial dalam perkembangan usaha ekonomi rakyat.

kesempatan menjadi “tuan” di wilayahnya sendiri, dan memiliki posisi penuh sebagai subjek pembangunan.

- d. Prinsip saling belajar dan menghargai perbedaan. Pengalaman masyarakat setempat dan orang luar (fasilitator) tidak jarang berbeda. Hal ini merupakan sesuatu yang wajar, bahkan ini berlangsung untuk memilih mana yang paling tepat untuk kondisi setempat. Hal ini akan membawa kemajuan dalam arti yang sesungguhnya. Karena itulah, sangat penting dan perlu memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk belajar sambil berpraktik (*learning by doing*).
- e. Prinsip santai dan informal, Suasana santai dan informal perlu dibangun, agar masyarakat maupun orang luar menyatu, akrab, luwes tidak ada suasana “asing”. Orang luar yang akan datang ke lokasi menyesuaikan waktu luang masyarakat setempat, bukan sebaliknya, dan tanpa perlu protocol penyambutan.
- f. Prinsip triangulasi, Untuk mendapatkan informasi yang tepat, benar, dan relevan harus dilakukan *chek and recheck*. Triangulasi dilakukan dengan cara melibatkan berbagai kelompok yang beragam.
- g. Prinsip mengoptimalkan hasil, Sekian banyak informasi yang tidak diperlukan sebaiknya diabaikan. Setelah diambil keputusan yang tepat, barulah perlu gerakan motivasi agar sebanyak mungkin masyarakat berperan.
- f. Prinsip orientasi praktis. Setelah mendapatkan informasi untuk memahami persoalan masyarakat, maka harus segera dilakukan tindak lanjutnya bersama masyarakat, bukan hanya menyampaikan teori-teori yang justru tidak terjangkau oleh masyarakat.
- g. Prinsip keberlanjutan dan selang waktu. Setelah tiga atau enam bulan, hasil kegiatan perlu dievaluasi. Sehingga diperlukan perbaikan-perbaikan untuk bisa menyempurnakan karena

ada tuntutan masyarakat (*rising demand*). Evaluasi sangat diperlukan guna mendapatkan umpan balik untuk perencanaan tahap berikutnya.

- h. Prinsip belajar dari kesalahan. Kesalahan-kesalahan dan kekurangan adalah sesuatu yang wajar, akan tetapi setelah satu periode dievaluasi didapatkan *feed back* guna penyempurnaan kegiatan berikutnya. Oleh karena itu, sebaiknya tidak menunjukkan rasa kecewa dan kekesalan pada awal proses di mana masyarakat ikut serta.
- i. Prinsip terbuka. hal ini sangat diperlukan guna perbaikan konsep dan teknik yang sangat berguna.

Dalam metode PRA, dikenal lima dasar program, yaitu:

- a. Penjajakan/pengenalan kebutuhan
- b. Perencanaan kegiatan.
- c. Pemantauan kegiatan.
- d. Pelaksanaan/pengorganisasian kegiatan
- e. Evaluasi kegiatan.⁵⁰

⁵⁰ Ibid., 160.

- mudah menggalang semangat kebersamaan masyarakat untuk ikut serta dalam menyelenggarakan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dimotori oleh pondok pesantren.
- c. Peranan dalam sumber daya manusia, seperti dalam sistem pendidikan yang dikembangkan oleh pondok pesantren sebagai upaya mengoptimalkan potensi yang dimilikinya, pondok pesantren memberikan pelatihan khusus atau diberikan tugas mengang di beberapa tempat, lembaga atau instansi yang sesuai dengan pengembangan yang akan dilakukan oleh pondok pesantren. Hal ini sangat membantu tugas pemerintah dalam upaya pemerataan kegiatan pengembangan, khususnya ekonomi di daerah agar setiap daerah memiliki potensi sumber daya manusia yang kompeten.
 - d. Peranan sebagai *agent of development*, dimana pondok pesantren dilahirkan untuk memberikan respon terhadap situasi dan kondisi sosial suatu masyarakat yang tengah dihadapkan pada runtuhnya sendi-sendi moral melalui transformasi nilai yang ditawarkan pondok pesantren. Kehadirannya bisa disebut sebagai agen perubahan sosial (*agen of social change*) yang selalu melakukan pembebasan pada masyarakat dari segala keburukan moral, penindasan politik, pemiskinan ilmu pengetahuan dan bahkan dari kemiskinan ekonomi. Institusi pondok pesantren dengan begitu mengesankan telah berhasil mentransformasikan masyarakat di sekitarnya menuju kemakmuran dan kesejahteraan bersama. Pada tataran ini, pondok pesantren telah berfungsi sebagai pelaku pemberdayaan masyarakat (*social empowerment*), dan menjadi agen bagi pembangunan nasional, dalam lingkup yang menjadi tanggung jawabnya.
 - e. Peranan sebagai *center of excellence*

Hal ini dikarenakan salah satu misi awal didirikannya pondok pesantren adalah menyebarluaskan informasi ajaran dan pengetahuan agama islam ke seluruh pelosok nusantara yang berwatak pluraris, baik dalam dimensi kepercayaan, budaya maupun kondisi sosial masyarakat. Melalui medium pendidikan yang dikembangkan dalam bentuk pondok pesantren. Sebagai upaya untuk menjawab tantangan zaman, pondok pesantren kemudian mengembangkan peranannya dari sekedar lembaga keagamaan dan pendidikan menjadi lembaga pemberdayaan masyarakat, sehingga pada tataran ini pondok pesantren telah berfungsi sebagai pusat keagamaan pendidikan dan pemberdayaan masyarakat.

2. Bentuk-Bentuk Sinergi Alumni dan Pondok Pesantren dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kabupaten Sumenep

Bentuk-bentuk sinergi Pondok Pesantren Annuqayah dan alumni dalam pemberdayaan ekonomi bisa dianalisis pada tiga klasifikasi yaitu:

1. Penekanan pemberdayaan ekonomi berkelanjutan dimana para santri di kalangan pondok pesantren Annuqayah terus diasah dan diberikan pelatihan di sekolah formal yaitu sekolah menengah kejuruan (SMK) dan di perguruan tinggi, yaitu Institut Ilmu Keislaman Annuqayah (INSTIKA).
2. Pengelolaan asset milik pondok pesantren oleh para alumninya, mulai dari produksi hingga pemasarannya. Para alumni yang notabeneanya santri terlibat langsung demi pembedayaan ekonomi kedua belah pihak. Pesantren memiliki sumber daya manusia yang tercukupi dan pula alumni memiliki peluang untuk mencari nafkah keluarganya.

“Sinergi antara pondok pesantren dan alumni sangatlah penting apabila ingin mengembangkan assetnya, peran alumninya sangat urgen dari pengembangan asset kita, pihak pesantren akan menilai potensi alamnya untuk dikelola dengan baik, mengenai sumber daya manusia kami memang sering mengadakan berbagai pelatihan khusus yang bekerjasama dengan Biro Pengabdian Masyarakat (BPM)”.

Lembaga swadaya masyarakat yang bernama BPM tersebut menggunakan beberapa metode khusus dalam pemberdayaan ekonomi di tengah masyarakat khususnya untuk para alumni yang tersebar di beberapa wilayah kabupaten Sumenep.

Salah satu metode yang digunakan oleh BPM adalah *Participatory Rural Appraisal* (PRA) diartikan sebagai pengkajian desa secara partisipatif. Teknik ini pertama kali digunakan di Indonesia pada tahun 1993 di lingkungan konsorsium pengembangan dataran tinggi Nusa Tenggara (KPDTNT) dalam upaya pemberdayaan masyarakat, PRA sesungguhnya bisa diaplikasikan di masyarakat desa (*rural*) wilayah kota (*urban*) maupun sub urban. Oleh karena itu, akan lebih mewakili kenyataan apabila PRA diartikan sebagai kajian masyarakat secara partisipatif. Beberapa hal yang harus menjadi prinsip dalam pengembangan metode ini adalah sebagai berikut:

- a. Prinsip mengutamakan yang terabaikan, Tanpa mengabaikan kelompok manapun di dalam masyarakat, PRA mengutamakan pemberian kesempatan pada kelompok yang selama ini kurang diberi kesempatan peran berbagai proses pembangunan masyarakat yang terpinggirkan, sedangkan kelompok lain sudah berdaya dengan kekuatan sendirinya.
- b. Prinsip pemberdayaan (penguatan masyarakat), Masyarakat yang selama ini terpinggirkan melalui PRA diberi kemampuan mengkaji keadaan, mengambil

- a. Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*). Disini titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia, setiap masyarakat, memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Artinya, tidak ada masyarakat yang sama sekali tanpa daya. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya itu, dengan mendorong, memotivasi, membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya.
- b. Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat (*empowering*). Dalam rangka ini diperlukan langkah-langkah yang lebih positif, selain dari hanya menciptakan iklim dan suasana. Penguatan ini meliputi langkah-langkah nyata, dan menyangkut penyediaan berbagai masukan (*input*), serta pembukaan akses ke dalam berbagai peluang (*opportunities*) yang akan membuat masyarakat menjadi berdaya. Dalam rangka pemberdayaan ini, upaya yang amat pokok adalah peningkatan taraf pendidikan, dan derajat kesehatan, serta akses ke dalam sumber-sumber kemajuan ekonomi seperti modal, teknologi, informasi, lapangan kerja, dan pasar. Masukan berupa pemberdayaan ini menyangkut pembangunan prasarana dan sarana dasar fisik, seperti irigasi, jalan, listrik, maupun social seperti sekolah dan fasilitas pelayanan kesehatan, yang dapat dijangkau oleh masyarakat pada lapisan paling bawah, serta ketersediaan lembaga-lembaga pendanaan, pelatihan, dan pemasaran di pedesaan, dimana terkonsentrasi penduduk yang keberdayaannya amat kurang. Untuk itu, perlu ada program khusus bagi masyarakat yang kurang berdaya, karena program-program umum yang berlaku tidak selalu dapat menyentuh lapisan masyarakat ini. Pemberdayaan bukan hanya meliputi penguatan individu anggota masyarakat, tetapi juga pranata-pranatnya. Menanamkan nilai-nilai budaya modern seperti kerja keras, hemat, keterbukaan, dan

kebertanggungjawaban adalah bagian pokok dari upaya pemberdayaan ini. Demikian pula pembaharuan institusi- institusi sosial dan pengintegrasianya ke dalam kegiatan pembangunan serta peranan masyarakat di dalamnya. Yang terpenting disini adalah peningkatan partisipasi rakyat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut diri dan masyarakatnya. Jadi esensi pemberdayaan bukan hanya meliputi penguatan individu anggota masyarakat tetapi juga termasuk penguatan pranata- pranatanya.

- c. Memberdayakan berarti pula melindungi. Dalam proses pemberdayaan, harus dicegah yang lemah menjadi bertambah lemah, oleh karena kekurangberdayaan dalam menghadapi yang kuat. Oleh karena itu, perlindungan dan pemihakan terhadap yang lemah amat mendasar sifatnya dalam konsep pemberdayaan masyarakat. Melindungi tidak berarti mengisolasi atau menutupi dari interaksi, karena hal itu justru akan mengerdilkan yang kecil dan melunglaikan yang lemah. Melindungi harus dilihat sebagai upaya untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang, serta eksploitasi yang kuat atas yang lemah. Pemberdayaan masyarakat bukan membuat masyarakat menjadi tergantung pada berbagai program pemberian (*charity*). Pendekatan utama dalam konsep pemberdayaan adalah bahwa masyarakat tidak dijadikan obyek dari berbagai proyek pembangunan, tetapi merupakan subyek dari upaya pembangunan itu sendiri.¹⁶

¹⁶ Natalia Artha Malau, "Strategi Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan", Jurnal Ilmiah Integritas, Vol.1 No. 4 (Desember 2015).

Prinsip belajar dari kesalahan, Prinsip terbuka. Selain itu, untuk memberdayakan ekonomi masyarakat Kabupaten Sumenep secara umum, alumni dan Pondok Pesantren Annuqayah melakukan 3 strategi pemberdayaan, yaitu: Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*), Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat (*empowering*), Memberdayakan sekaligus melindungi wilayah dengan potensi ekonomi yang lemah.

B. Saran

1. Koordinasi dari masing-masing desa sebaiknya harus lebih di prioritaskan agar segala informasi bisa cepat tersampaikan.
2. Adanya program prioritas dalam bentuk usaha yang bisa mengelola potensi desa di berbagai tempat sehingga menyerap banyak tenaga kerja, secara otomatis alumni bisa lebih di perdayakan.
3. Manajemen dan pengelolaan yang lebih profesional agar tercipta pengembangan usaha yang mumpuni.

